BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Di Desa Perumnas Simalingkar, Kabupaten Deli Serdang

Windawati Pinem[1], Prayetno[2], Muhammad Iqbal[3], Taufiq Ramadhan[4], Hikmawan Syahputra[5]
[1]Universitas Negeri Medan
Jalan Willem Iskandar, Medan

e-mail : windawatipinem@unimed.ac.id

Abstrak

Pendampingan desa dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) adalah sebuah proses fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintahan desa serta masyarakat agar mampu menyusun perencanaan dan penganggaran desa yang adil gender, berpihak kepada kelompok rentan (perempuan, anak-anak, lansia, difabel, dan masyarakat miskin). Hal ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengaurusutamaan Gender di Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun metode pendampingan yang dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dengan melibatkan beberapa stakeholder seperti kelompok perempuan/PKK/Posyandu sebanyak 10 orang, kelompok rentan (masyarakat miskin/difabel/lansia) sebanyak 10 orang. Tujuan dilakukannya pendampingan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat tentang konsep gender dan PPRG, memperkuat partisipasi kelompok perempuan dan rentan dalam musyawarah desa, mendorong integrasi analisis gender dalam RPJMDes, APBdes, RPKDes, serta menghasilkan program dan anggaran desa yang responsive gender. Sasaran yang menjadi pendampingan yaitu kepala desa bersama perangkat desa, BPD, kader PKK, kader posyandu, tokoh perempuan, dan kelompok rentan (masyarakat miskin dan difabel).Adapun hasil pendampingan PPRG di desa Perumnas Simalingkar yaitu aparatur desa bersama dengan masyarakat mampu mengintegrasikan konsep gender kedalam program/kegiatan desa.

***Kata kunci**: Pendampingan, Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender, Desa Perumnas Simalingkar*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan sebuah proses jangka panjang yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya tanpa ada perbedaan jenis kelamin, usia, stastus sosial dan ekonomi. Pembangunan desa tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik berupa infrastruktur, melainkan pembangunan non-fisik seperti peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam hal ini yang menjadi prioritas utama adalah terjaminnya hak-hak semua kelompok masyarakat untuk mendapatkan manfaat pembangunan. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan desa yaitu terakomodasinya semua kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu pembangunan desa menjadi bagian penting sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangun ini diperkuat dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 yang memberikan pandangan baru tentang desa. Melalui UU Desa tersebut, desa diharapkan mampu menjadi desa yang mandiri dan otonom secara ekonomi, sosial, budaya dan lainnya [1]. Dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa pembangunan desa meliputi empat bidang, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga desa tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengelola sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi pembangunan desa masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah persoalan kesenjangan gender. Sehingga pembangunan desa masih belum benar-benar mengakomodasi kebutuhan kaum perempuan maupun kelompok rentan lainnya. Hal ini berdampak terhadap kebijakan dan program yang dibuat tidak merangkul kelompok rentan dan perempuan didalamnya. Sehingga seringkali anggaran desa yang dimiliki juga tidak menyentuh sepenuhnya kebutuhan laki-laki secara spesifik, begitu juga dengan kelompok rentan dan perempuan. Hal inilah yang kemudian bisa mengakibatkan tidak efektifnya pembangunan desa. Padahal desa menjadi salah satu tempat yang krusial dalam hal pembangunan. Mengingat pembangunan yang dianggap berhasil tentunya harus dimulai dari struktur pemerintahan yang terendah yakni desa. Salah satu alasannya adalah karena desa seringkali dekat dengan kehidupan masyarakat. Ada beberapa kebijakan yang dapat di implementasikan di desa seperti dalam RPJM Des, RKPDes, dan APBDes. Sehingga dari beberapa kebijakan tersebut sudah seharusnya terdapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang inklusif dan responsif gender. Oleh karena itu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan serta kelompok lainnya. Karena pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan tidak hanya menekankan pada partisipasi perempuan, melainkan terjaminnya ruang yang aman yang mendukung perempuan dan anak [2].

Maka dari itu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menjadi sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran di desa. Adapun penganggaran responsif gender yaitu perencanaan yang partisipatif dengan mempertimbangkan empat aspek penting seperti akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Aspek tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan. Tujuannya adalah untuk mengatasi persoalan kesenjangan gender [3] Melalui dana desa pemerintah desa diharapkan mampu mendorong desa agar mampu menyusun perencanaan dan penganggaran secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dimulai dengan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG). Kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) bukan menjadi hal baru di Indonesia. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengaurusutamaan Gender di Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kebijakan ini menjadi pedoman lalu diperkuat melalui regulasi, namun implementasi PPRG masih sangat rendah. Banyak desa yang justru menjadi *gender blind*, sebab tidak menguasai konsep PPRG secara detail [4]. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu tujuan dilakukan pendampingan dalam penyusunan dan implementasi PPRG di desa perumnas Simalingkar.

Seperti yang diketahui bahwa Desa Perumnas Simalingkar merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki penduduk yang cukup majemuk dan tidak jauh dari pusat kota Medan. Desa yang hampir setiap tahun menjadi langganan banjir karena terletak di dekat Sungai. Ada banyak persoalan yang harus di selesaikan di desa ini, salah satunya yaitu minimnya pemahaman tentang konsep kesetaraan gender. Bahkan Implementasi PPRG di desa Perumnas Simalingkar masih pada batas sosialisasi program DP3AKB, sehingga proses perencanaan dan penganggaran responsive gender belum berjalan maksimal. Padahal PPRG Desa lebih menguatkan pada proses dan hasil pembangunan desa yang mampu memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di desa. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah strategi agar pemerintah desa dapat melaksanakan PPRG desa secara efektive dan efisien untuk pembangungan yang adil. Adapun yang dibutuhkan dalam melakukan integrasi gender yaitu

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

instrumen GAP sebagai dasar perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG) dalam dokumen RPJMDes Renstra SKPDes, RKPDes. Adapun pihak yang terlibat dalam pendampingan yaitu: kepala desa dan aparatur desa, kelompok perempuan/PKK/Posyandu sebanyak 10 orang, kelompok rentan (lansia, masyarakat miskin dan difabel) sebanyak 10 orang. Dengan jumlah pendamping 8 orang yang terdiri dari 4 orang dosen dan 4 mahasiswa. Pendampingan PPRG ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan berbagai tahapan yang harus dilewati. Adapun output dari pendampingan ini yaitu berupa draft anggaran belanja desa yang dibuat berdasarkan anggaran responsive gender. Anggaran responsif gender yang dimaksud adalah dalam pembuatan anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok perempuan, kelompok rentan, masyarakat miskin, difabel dan juga laki-laki. Oleh karena itu PPRG bukanlah tujuan akhir dalam proses pembangunan desa, melainkan sebagai sebuah jalan untuk menciptakan keadilan gender.

2. METODE PENGABDIAN

Adapun metode pelaksanaan PPRG di desa Perumnas Simalingkar dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini yang menjadi subjek utama kegiatan PPRG yaitu pemerintah desa dan masyarakat, terutama kelompok perempuan. Hal ini berangkat dari tujuan utama pelaksanaan PPRG yang harus benar-benar mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok perempuan. Sehingga kebijakan, kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah desa sudah benar-benar merespon segala kebutuhan kelompok perempuan. Pada konteks Desa Perumnas Simalingkar, pendekatan ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana proses pembangunan telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara inklusif. PPRG dapat menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan desa dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender, karena kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat diidentifikasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Berikut tahapan dan materi yang diberikan dalam melakukan pendampingan PPRG desa yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Advokasi
   - Penyamaan persepsi yang memastikan aparat desa, BPD (badan permusyawaratan desa) dan tokoh masyarakat memahami konsep gender dan pentingnya PPRG.
   - Komitmen politik: mendorong adanya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa atau Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi landasan hukum pelaksanaan PPRG.
2. Pengkajian Situasi Gender
   - Pengumpulan data terpisah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) untuk mengidentifikasi kesenjangan dan masalah gender di desa.
   - Analisis: melakukan analisa peran, akses, kontrol dan mafaat pembangunan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan.
3. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
   - Integrasi hasil PSG dengan menggunakan hasil PSG sebagai dasar dalam penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
   - Penyusunan Anggaran dengan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk program dan kegiatan yang secara spesifik menyasar kesenjangan gender.
4. Pelaksanaan
   - Penerapan program yaitu melaksanakan kegiatan pembangunan desa sesuai rencana yang responsif gender
   - Melibatkan masyarakat yang memastikan kelompok perempuan dan kelompok rentan ikut berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pembangunan.
5. Pemantauan dan Evaluasi

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

- Pemantauan terhadap kegiatan dan penggunaan anggaran yang digunakan
- Evaluasi dampak yang ditimbulkan terhadap perubahan kesetaraan gender.

Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi dan advokasi dimana tahap ini melakukan komunikasi dan kordinasi dengan kepala desa, BPD (Badan Perwakilan Desa), aparatur desa, perwakilan kelompok perempuan, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat miskin, dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang terhubung dengan kegiatan ini. Adapun tujuan dilakukannya tahap ini untuk mendapatkan gambaran awal tentang kondisi masyarakat desa terkait dengan pembangunan desa. Di tahap ini nantinya akan didapatkan berbagai informasi tentang kebutuhan setiap kelompok masyarakat dari berbagai elemen yang telah dijelaskan tadi. Di tahap ini juga diharapkan masyarakat menjadi memiliki pengetahuan tentang konsep PPRG sehingga memiliki kesadaran gender. Setelah melakukan tahap pertama maka dilanjutkan dengan pengkajian situasi gender. Disini dilakukan identifikasi dan pemetaan kondisi masyarakat berdasarkan perspektif gender. Kegiatan dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), serta telaah terhadap data dan dokumen desa. Adapun *stake holder* yang terlibat berasal dari kelompok perempuan/PKK/Posyandu sebanyak 10 orang, kelompok rentan (masyarakat miskin/kelompok difabel/lansia sebanyak 10 orang. Dengan jumlah pendamping 8 orang yang terdiri dari 4 orang dosen dan 4 mahasiswa. Dalam FGD materi yang diberikan terkait pentingnya pemahaman tentang gender dan penyusunan PPRG. Sebelum penyampaian materi terlebih dulu melakukan pemetaan terhadap kelompok masyarakat dengan menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan karakteristik sosial lainnya apabila tersedia. Data tersebut dapat mencakup kondisi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesehatan, keterlibatan dalam organisasi masyarakat, akses terhadap pelayanan publik, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, serta partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Pemetaan juga memperhatikan kondisi kelompok yang memiliki kerentanan tertentu, seperti perempuan kepala keluarga, keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lainnya. Tahap selanjutnya adalah penyusunan program dan kegiatan responsive gender. Hasil analisis gender yang telah di dapatkan pada tahap 2 digunakan untuk dapat merencang program dan kegiatan yang responsif gender di desa Perumnas Simalingkar. Setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan dan implementasi PPRG. Dalam pelaksanaan PPRG harus benar-benar disesuaikan dengan akses dan kebutuhan kelompok perempuan. Tahapan terakhir adalah monitoring terhadap pelaksanaan PPRG. Tujuannya adalah untuk dapat memastikan bahwa PPRG berjalan sesuai dengan semestinya. Adapun kekurangan yang ditemukan pada saat implementasi menjadi catatan penting untuk perbaikan di kemudian hari.



Gambar 1. Tahapan PPRG

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Gambar tersebut menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Tahapan kegiatan diawali dengan sosialisasi dan advokasi kepada mitra pengabdian serta pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran, mendorong partisipasi aktif, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif dan responsif gender.

Tahap berikutnya adalah pengkajian situasi gender yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, permasalahan, serta potensi kesenjangan gender yang terdapat pada mitra pengabdian. Pengkajian ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas permasalahan dan merumuskan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hasil pengkajian selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), sehingga program yang dirancang dapat mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan maupun laki-laki secara proporsional.

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana kegiatan yang telah disusun. Pada tahap ini, tim pengabdian bersama mitra melaksanakan program melalui pendampingan, edukasi, diskusi, dan kegiatan lain yang relevan dengan kebutuhan sasaran. Keterlibatan aktif mitra menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Tahap akhir berupa pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai keterlaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi mitra, serta perubahan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut. Dengan tahapan tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan memberikan manfaat nyata bagi mitra serta mendorong penerapan prinsip responsif gender secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

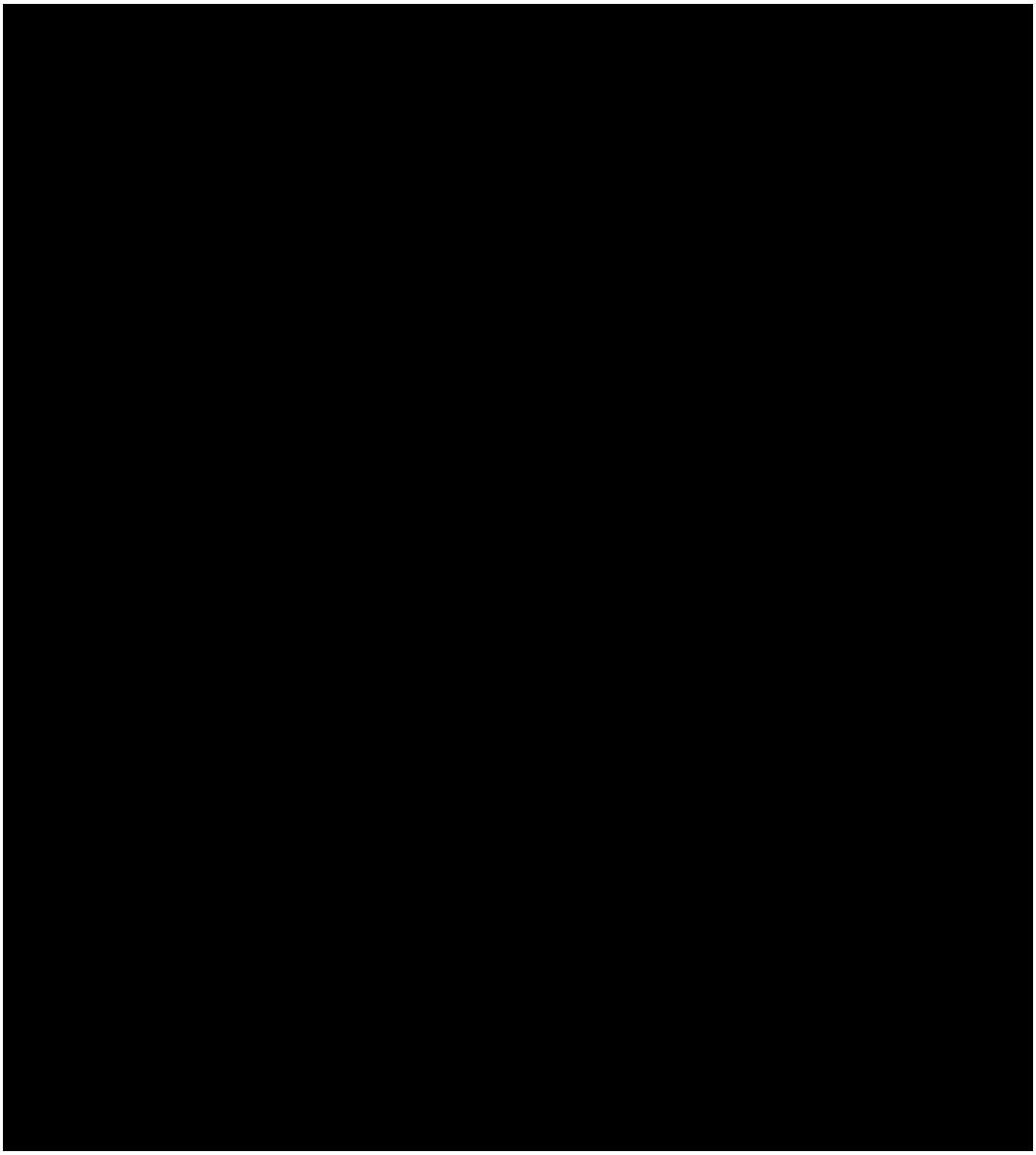
Adapun hasil pendampingan PPRG di Desa Perumnas Simalingkar yang telah dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan aparatur desa tentang PPRG. Pendampingan yang dilakukan menambah pengetahuan aparatur desa terutama tentang kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam upaya pembangunan desa. Hal ini menjadi fondasi utama bagi desa untuk memahami konsep PPRG.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mengidentifikasi kesenjangan gender. Pendampingan ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara kelompok perempuan dan laki-laki di tingkat desa.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparatur desa dalam menyusun perencanaan desa yang responsif gender. Pendampingan membantu desa mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, penentuan program, hingga penyusunan kegiatan prioritas.
4. Mampu memetakan kebutuhan semua elemen masyarakat. Setelah dilakukan pendampingan desa sudah mulai memiliki gambaran tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa.

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

5. Terciptanya komitmen dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparatur desa.Melalui pendampingan ini tercipta hubungan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparatur desa dalam pembangunan desa.

Tabel 1. Hasil Integrasi Gender Dalam Penyusunan GAP, GBS, KAK Peningkatan Kapasitas Kesehatan Keluarga Desa Responsif Gender di Desa Perumnas Simalingkar



Pembahasan

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di desa Perumnas Simalingkar menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan partisipatif serta mampu mengakomodasi kepentingan semua kelompok masyarakat. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti kelompok perempuan, masyarakat miskin, kaum difabel, laki-laki, pemuka adat, pemuka agama, PKK, dan kader posyandu. Selain kelompok tersebut juga didampingi oleh aparatur desa seperti kepala

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

desa, sekretaris desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Seperti yang diketahui bahwa persoalan ketidaksetaraan gender masih menjadi dilema bagi masyarakat kota maupun pedesaan. Terutama bagi perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan, kesenjangan gender masih sangat kuat terasa. Oleh karena itu berangkat dari ketidakadilan tersebut maka dilakukanlah pemetaan untuk mewujudkan kesetaraan gender [5].

A. Pelaksanaan PPRG di desa Perumnas Simalingkar

Pelaksanaan PPRG di desa Perumnas Simalingkar yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dilakukan setelah melakukan observasi terhadap kondisi masyarakat di desa tersebut. Sebagai permulaan sebelum melakukan kegiatan PPRG, mengumpulkan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat menjadi fondasi penting. Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan kelompok perempuan. PPRG bukan hanya sebagai metode penyusunan anggaran yang diperuntukkan bagi kaum perempuan, melainkan sebuah pendekatan untuk memastikan bahwa kebijakan, program dan kegiatan pemerintah desa bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Desa Perumnas Simalingkar menjadi salah satu lokasi tempat dilakukannya kegiatan PPRG dengan beberapa permasalahan yang ada seperti, pemahaman masyarakat yang masih sangat terbatas tentang penganggaran responsif gender. Bahkan PPRG hanya dipahami sebagai sebuah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk kesetaraan gender. Namun pemerintah desa belum benar-benar memahami cara implementasi PPRG dalam anggaran desa.



Gambar 1.Kegiatan FGD dalam pendampingan PPRG yang dilakukan dengan aparatur desa dan masyarakat desa perumnas simalingkar

B. PPRG sebagai alat mengukur ketimpangan Gender

Salah satu temuan penting dalam melakukan pendampingan PPRG di Desa Perumnas Simalingkar adalah masih terdapatnya ketimpangan gender dalam bentuk perbedaan akses pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, informasi, kesehatan dan pengambilan keputusan. Melalui pendampingan PPRG ini pemerintah desa terbantu untuk menentukan kebijakan dan program yang dibutuhkan oleh laki-laki dan perempuan. Disini pemerintah desa juga diharapkan juga telah mampu untuk menganalisis hambatan yang muncul dalam menyusun anggaran responsif gender.

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

C. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa

Perempuan tidak hanya menjadi objek dalam pembangunan desa, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Pembangunan desa akan dianggap berhasil jika manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok perempuan. PPRG memiliki hubungan dengan bagaimana caranya meningkatkan partispasi perempuan dalam pembuatan kebijakan. Namun sayangnya perempuan masih banyak mengalami hambatan dalam proses pembangunan desa. Di Desa Perumnas Simalingkar misalnya walaupun kepala desanya perempuan namun bukan berarti kebijakan selalu memihak kepada kelompok perempuan. Dalam anggaran desa pun perempuan belum menjadi sektor penting dalam pembangunan. Melalui pendampingan PPRG inilah kemudian aparatur desa mulai memikirkan kebutuhan perempuan dalam anggaran desa.

D. Integrasi gender dalam anggaran desa

Adapun penganggaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PPRG. Tentunya dalam proses penganggaran dibutuhkan sumber daya sebagai elemen pendukung. Adanya integrasi gender dalam penganggaran bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan kelompok masyarakat yang telah diidentifikasi menjadi prioritas utama. Penganggaran dalam PPRG bukan berarti memisahkan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Namun memastikan bahwa semua kebutuhan terakomodasi dengan baik. Dalam proses penganggaran ini dibutuhkanlah aparatur desa yang memahami konsep gender, analisis gender, penyusunan indikator, dan penentuan kelompok sasaran. Sehingga melalui pemahaman ini tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan menghasilkan pembangunan desa yang bermanfaat.

Tabel 2. Contoh hasil integrasi perspektif gender dalam dokumen/program desa

No	Program/Kegiatan Desa	Permasalahan Gender	Integrasi Gender dalam Program	Contoh Kegiatan di Desa Perumnas Simalingkar	Indikator
1	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Perempuan memiliki keterbatasan akses terhadap modal, pelatihan, dan pemasaran	Memastikan perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi	Pelatihan UMKM, pengolahan makanan, pemasaran digital, dan akses permodalan bagi perempuan	Jumlah perempuan mengikuti pelatihan dan mengembangkan usaha
2	Kesehatan masyarakat	Perempuan memiliki kebutuhan kesehatan reproduksi dan	Memasukkan kebutuhan perempuan dalam perencanaan	Posyandu, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan	Meningkatnya akses perempuan terhadap layanan

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

		pengasuhan yang spesifik	kesehatan desa	kesehatan perempuan	kesehatan
3	Musyawarah perencanaan pembangunan desa	Suara perempuan berpotensi kurang terwakili dalam pengambilan keputusan	Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam Musdes/Musrenbangdes	Mengundang kelompok perempuan dan mencatat usulan perempuan dalam perencanaan	Meningkatnya jumlah dan kualitas usulan perempuan

E. Hambatan dalam pelaksanaan PPRG

Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi PPRG di Desa Perumnas Simalingkar. Pertama, masih rendahnya pemahaman tentang konsep kesetaraan gender. Gender hanya dipahami sebagai persoalan kelompok perempuan. Padahal ketika berbicara tentang gender, juga membicarakan tentang laki-laki, kelompok rentan, kaum difabel dan lainnya. Namun relasi sosial yang mengalami ketimpangan belum dipahami sebagai bagian dari gender. Kedua, terbatasnya untuk mendapatkan data terpilah yang menjadi penghambat dalam proses identifikasi masalah gender. Keterbatasan data ini membuat pemerintah desa kesulitan untuk menentukan kelompok sasaran. Ketiga, partisipasi masyarakat masih rendah dalam proses perencanaan. Hadirnya masyarakat dalam sebuah musyawarah belum menjadi penentu bahwa semua kelompok masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan/keputusan. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah mekanisme yang benar-benar memastikan keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili. Keempat, masih terdapat kesulitan dalam mengintegrasikan hasil analisis gender kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender. Kesulitan ini diakibatkan oleh masih belum maksimalnya kordinasi antar berbagai aktor desa dengan masyarakat dalam mengidentifkasikan kebutuhan-kebutuhan. Padahal melalui kordinasi ini sebenarnya dapat memudahkan dalam menterjemahkan berbagai program desa.

4. SIMPULAN

PPRG merupakan pendekatan yang menghubungkan tiga aspek utama dalam pembangunan desa, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, proses pengambilan keputusan, dan distribusi sumber daya pembangunan. Pendampingan berperan sebagai mekanisme untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam ketiga aspek tersebut. Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami persoalan gender. Adapun tujuannya adalah untuk mengatasi persoalan kesenjangan gender yang ada di Desa Perumnas Simalingkar. Pendampingan ini merupakan salah satu bagian penting dari pemerataan pembangunan desa yang responsif gender. Sehingga diharapkan Desa Perumnas Simalingkar mampu menjadi desa yang inklusif dan responsif gender. Namun Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Desa Perumnas Simalingkar masih memiliki beberapa hambatan dalam mengimplementasikannya. Adapun beberapa hambatan yang dialami oleh desa yaitu Pertama, masih rendahnya pemahaman tentang konsep kesetaraan gender. Gender hanya dipahami sebagai persoalan kelompok perempuan. Padahal ketika berbicara tentang gender, juga membicarakan tentang laki-laki, kelompok rentan, kaum difabel dan lainnya. Namun relasi

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

sosial yang mengalami ketimpangan belum dipahami sebagai bagian dari gender. Kedua, terbatasnya untuk mendapatkan data terpilah yang menjadi penghambat dalam proses identifikasi masalah gender. Keterbatasan data ini membuat pemerintah desa kesulitan untuk menentukan kelompok sasaran. Ketiga, partisipasi masyarakat masih rendah dalam proses perencanaan. Hadirnya masyarakat dalam sebuah musyawarah belum menjadi penentu bahwa semua kelompok masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan/keputusan. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah mekanisme yang benar-benar memastikan keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili. Keempat, masih terdapat kesulitan dalam mengintegrasikan hasil analisis gender kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Selain itu pelaksanaan PPRG selama ini masih hanya sebatas persoalan administrasi belum pernah memasukkan dalam perencanaan anggaran. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab beberapa program/kebijakan desa belum menyentuh persoalan gender. Selain itu kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap persoalan gender. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang baik dalam bentuk regulasi dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan gender. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang PPRG. Penerapan PPRG menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa perlu didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. PPRG tidak berarti memberikan perlakuan khusus kepada perempuan, tetapi memastikan bahwa proses pembangunan dan alokasi anggaran mampu memberikan manfaat yang adil bagi perempuan, laki-laki, serta kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan berbeda. Dengan demikian, PPRG dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PPRG sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, ketersediaan data terpilah, keterlibatan masyarakat, serta komitmen pemerintah desa dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, pendampingan PPRG perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam penyusunan program dan anggaran desa pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, pendampingan PPRG di Desa Perumnas Simalingkar dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola pembangunan desa yang lebih responsif gender. Keberlanjutan kegiatan melalui penguatan kapasitas, pemanfaatan data gender, peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi diperlukan agar PPRG tidak berhenti sebagai kegiatan pendampingan, tetapi menjadi bagian dari praktik perencanaan dan penganggaran pembangunan desa secara berkelanjutan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Desa Perumnas Simalingkar diperlukan upaya berkelanjutan agar prinsip kesetaraan gender tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi dapat diintegrasikan secara konsisten dalam proses pembangunan desa. Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader pemberdayaan masyarakat, serta kelompok masyarakat dalam memahami konsep gender, analisis gender, penyusunan perencanaan, dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki. Pemerintah desa juga disarankan untuk melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat berdasarkan data yang terpilah menurut jenis kelamin, usia, kondisi sosial ekonomi, serta kelompok rentan. Data tersebut penting sebagai dasar dalam menentukan prioritas pembangunan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mampu menjawab kesenjangan dan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Selain itu integrasi PPRG perlu dilakukan sejak tahap identifikasi masalah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dengan demikian

Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 424 - 434 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5988 ***e*-ISSN : 2807-6907**

PPRG tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan tambahan, tetapi bisa menjadi bagian integral dari siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, juga perlu diperkuat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Pemerintah desa perlu menciptakan ruang partisipasi yang inklusif agar perempuan tidak hanya hadir dalam musyawarah desa, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, memberikan usulan, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PPRG. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah program yang ditujukan kepada perempuan, tetapi juga menilai sejauh mana program tersebut mampu mengurangi kesenjangan gender dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pendampingan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah, tenaga pendamping desa, perguruan tinggi, maupun lembaga terkait juga diperlukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah desa dalam menerapkan PPRG secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. N. Astika and N. Sri Subawa, "EVALUASI PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*, vol. 5, no. 2, 2021, doi: 10.31604/jim.v5i2.2021.223-232.

[2] M. A. Firmansyah and S. Lestari, "… PEMBERDAYAAN GENDER DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBASIS GENDER …," *Journal of Syntax Literate*, 2024.

[3] T. S. Pratiwi and V. Raisha, "Perempuan Dalam Kepemimpinan Dan Politik Untuk Mencapai Sustainable Development Goals (Sdg'S) Tahun 2030 Ditinjau Melalui Gender-Responsive Policymaking," 2024.

[4] W. Pinem, Prayetno, M. Iqbal, T. Ramadhan, and H. Syahputra, *Pembangunan Desa Responsive Gender (Konsep dan Panduan PPRG)*. Medan: Sang Pena Media.

[5] T. Lawson and J. Garrod, *DICTIONARY OF SOCIOLOGY*. 2012. doi: 10.4324/9780203058787.

[6] H. Hayati, A. Sahidu, M. Muktasam, B. Y. E. Yaniuartati, and M. K. DM. Ali, "SOSIALISASI PENYULUHAN YANG RESPONSIF GENDER BAGI PENYULUH UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs DI DESA SEPAPAN KECAMATAN JEROWARU LOMBOK TIMUR," *Jurnal Pepadu*, vol. 5, no. 4, 2024, doi: 10.29303/pepadu.v5i4.6048.

[7] D. P. Safitri and E. Edison, "Evaluasi Formatif: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, vol. 6, no. 2, 2020, doi: 10.32666/tatasejuta.v6i2.132.

[8] Turmudi, H., & Iksan. (2024). Demokrasi Desa: Revitalisasi Musyawarah Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 13(2). https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.313

[9] Sri Sari Bulan, L. (2021). Konsep Gender Menurut Nasaruddin Umar Dalam Buku Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an. Journal UINSUKA.

[10] UN Women. (2018). Gender-responsive local governance: Tools and practices. New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.